



## RENCANA STRATEGIS (2021 - 2026)



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran 2021 - 2026 ini.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Pesawaran ini merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan pada RPJMD dan prioritas program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih periode 2021 - 2026.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya BPBD Kabupaten Pesawaran sebagai satuan kerja yang melaksanakan tupoksi bidang penanggulangan bencana.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Gedong Tataan, November 2021

KEPALA PELAKSANA,



Drs. SOPYAN AGANI, MH.  
NIP. 19681128 198901 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Pengertian .....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.5 Sitematika Penulisan .....	I-8
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	II-1
2.1 FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD .....	II-1
1. Tugas .....	II-1
2. Fungsi .....	II-2
3. Struktur Organisasi .....	II-2
2.2 SUMBER DAYA SKPD .....	II-3
A. Sumber Daya Manusia .....	II-5
B. Sarana Dan Prasarana .....	II-6
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD .....	II-11
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD .....	III-1
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH .....	III -9
3.3 PENENTUAN ISSUE – ISSUE STRATEGIS .....	III -13
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 VISI DAN MISI BUPATI PESAWARAN .....	IV-1
A. VISI .....	IV-1

B. MISI .....	IV-1
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD .....	IV-3
A. TUJUAN .....	IV-3
B. SASARAN .....	IV-3
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SKPD .....	IV-4
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, PENDANAAN INDIKATIF .....	V-1
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VI-1
6.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA .....	VI-1
6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA .....	VI-2

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar	1	Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Pesawaran ....	II-5
Tabel	2.1	Daftar Komposisi SDM BPBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 II-6 .....	II-6
Tabel	2.2	Sarana dan Prasarana Peralatan .....	II-7
Tabel	2.3	Intensitas Bencana Tahun 2016-2020 .....	II-13
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Pesawaran.	II-16
Tabel	2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Pesawaran .....	II-20
Tabel	2.6	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran ..	II-23
Gambar	3	Sistem Penanggulangan Bencana.....	III-1
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Fungsi BPBD Kabupaten Pesawaran.....	III-6
Tabel	3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD terhadap Pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah .	III-12
Tabel	4.1	Tujuan,Sasaran dan Strategi dan Kebijakan.....	IV-5
Tabel	5.1	Matrik Tujuan,Sasaran,Indikator Kinerja,Program dan Kegiatan SKPD Beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021-2026 .... V-8	V-2
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Pesawaran.....	VI-4

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan Bupati di Kabupaten Pesawaran dan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 26 Februari 2021, maka Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global.

Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana strategis agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, maka secara sinergi pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) 2021-2026. Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 ayat (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran 2021-2026 adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

### 1.3. Pengertian

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, istilah-istilah yang perlu dipahami dalam bidang kebencanaan, supaya tidak menimbulkan persepsi yang bias, antara lain :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk cuaca.
21. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

#### 1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua jajaran dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Bidang Penanggulangan Bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021- 2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran adalah :

1. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana;
4. Merencanakan cara pengendalian Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran;
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
6. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan Penanggulangan Bencana;
7. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi Penanggulangan Bencana pada masa depan;
8. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan;
9. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar instansi pada saat terjadi Bencana.
10. Menjadi kerangka dasar dalam upaya penanggulangan bencana alam.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan  
Indikatif

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

BAB VII : Penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUAPTEN PESAWARAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran

##### 2.1.1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana sedangkan Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanganan bencana;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dibidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### 2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran terdiri :

- A. Kepala Badan
- B. Unsur Pengarah, yang terdiri dari :
  - Lembaga Instansi Pemerintah Daerah
  - Masyarakat Profesional/tenaga ahli
- C. Unsur Pelaksana yang terdiri dari :

Kepala Pelaksana, dibantu Oleh :

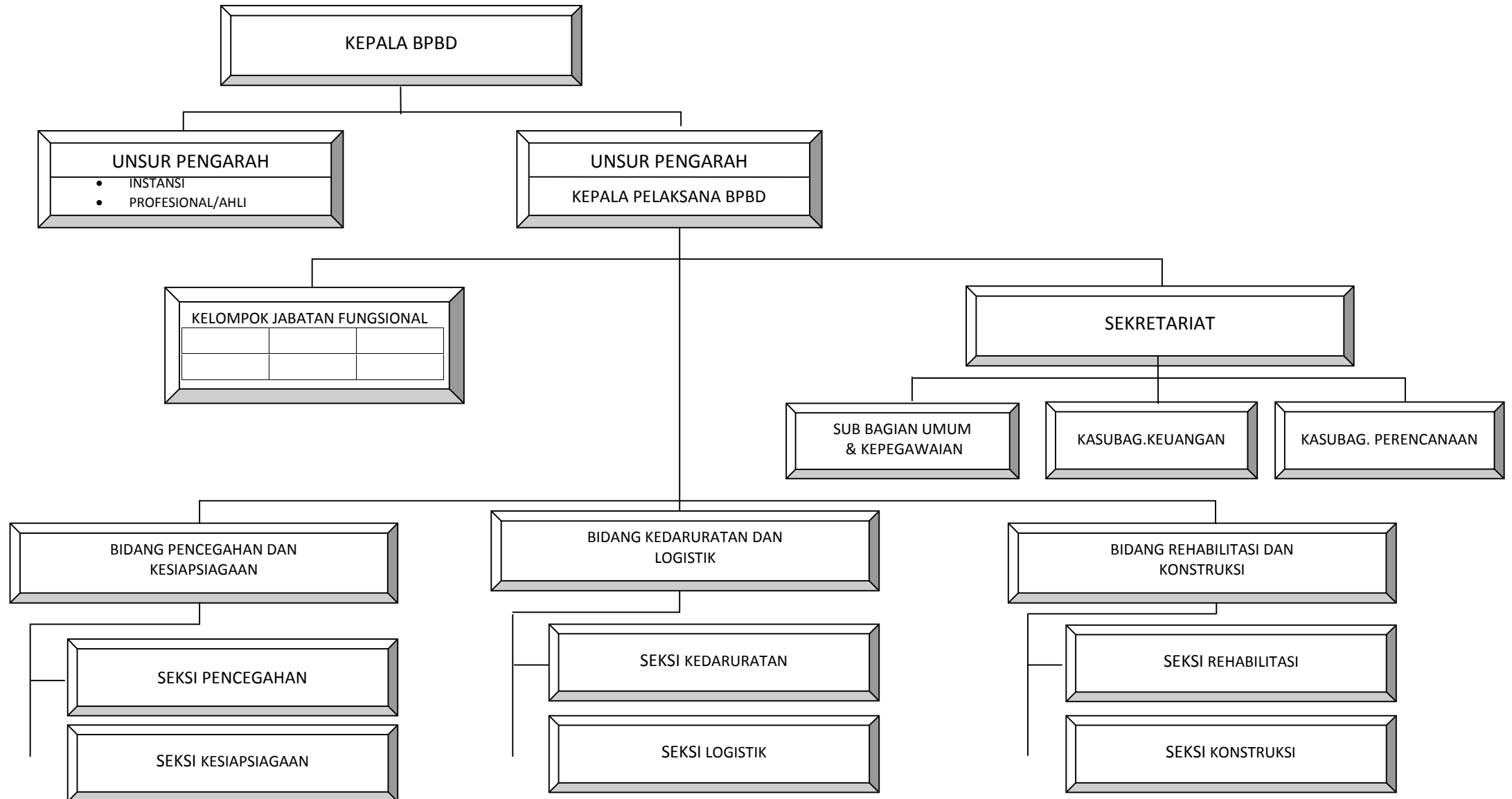
  1. Sekretariat membawahi :
    - a. Kepala Sub Bagian Umum;
    - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
    - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

2. Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Pencegahan;
  - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  - a. Kepala Seksi Kedaruratan;
  - b. Kepala Seksi Logistik.
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Rehabilitasi;
  - b. Kepala Seksi Rekonstruksi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.  
Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
  - a. Prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. Pasca bencana.



**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran  
Nomor : 07 Tahun 2011  
Tanggal : 26 April 2011



## 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya BPBD Kabupaten Pesawaran memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Untuk Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Pesawaran terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 (Enam Belas) Pegawai dan Tenaga Kontrak Umum sebanyak 18 Orang. Berikut daftar Komposisi dan Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan sebagai berikut :

Tabel 2.1

DAFTAR KOMPOSISI SDM BPBD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021

Esselon	BERDASARKAN GOL						BERDASARKAN PENDIDIKAN							DIKLAT YG DI IKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JML	STRUK.	FUNG.	JML
Ess. II	1					1	1						1	13		13
Ess. III	4					4	1	2		1			4	4		4
Ess. IV	1	8				9	4	3		2			9	9		9
Staf		2				2		2					2	2		2
PTK					18	18		4	3	11			18			
Jumlah	6	10			18	34	6	11	3	14			34	28		28
% Dari Jml Peg	17,65	29,41	0	0	52,94	100	17,65	32,35	8,82	41,18			100	100		100

Dilihat dari jumlah personil yang tersedia pada Tahun Anggaran 2021, jumlah ini masih belum memadai dan mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, mengingat besarnya frekuensi pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesawaran sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

## B. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja, sarana dan prasarana kantor merupakan faktor penunjang yang harus disiapkan oleh setiap satuan kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat).

Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran didukung sarana dan prasarana antara lain sebagai terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
SARANA DAN PRASARANA

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Kebutuhan jangka waktu 5 tahun	Perlu Penambahan	Keadaan Barang
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GEDUNG							
1	Kantor					1 Unit		Belum ada
2	Gudang Peralatan dan logistik					1 Unit		Belum ada
	KENDARAAN							
1	Minibus Mitsubishi Double Cabin	1 Unit	Baik					Baik
2	Minibus Isuzu Turbo LV	1 Unit	Baik					Baik
3	Double Cabin Pick Up Isuzu D-Max	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
4	Pick Up Isuzu TBR 54 Turbo	2 Unit	Baik				1 Unit	Baik
5	Motor Trail Kawasaki KLX 150s	4 Unit	Baik				2 Unit	Baik
	PERAHU							
1	Perahu Karet (Kapasitas 6 orang )	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
2	Perahu Karet (Kapasitas 8 orang )	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
3	Perahu Karet (Sillinger Kapasitas 10 orang )	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik

MESIN								
1	Generator Kipor KDE6700T	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
2	Mesin Sedot Apung Honda WB20XH	1 Unit	Baik					Baik
3	Gergaji Beton Shindaiwa EC7600	1 Unit	Baik					Baik
4	Water Treatment (portable)	1 Unit		Rusak			2 Unit	Rusak
5	Transportable Water Pump (Honda Wolf WP30)	2 Unit	Baik					Baik
6	Motor Boat 18K	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
7	Motor Boat (Yamaha 25 PK)	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
8	Transportable Generating Set (WEMA 7000)	1 Unit	Baik					Baik
9	Chain Saw	2 Unit	Baik				2 Unit	Baik
10	Portable Generating Set ( Genset 5KVA)	2 Unit	Baik					Baik
PERALATAN								
1	Standar Tool (Adapter/Over Sock)	2 Unit	Baik					Baik
2	Standar Tool (Nozzle Spray)	2 Unit	Baik				1 Unit	Baik
3	Standar Tool (Nozzle Tirus)	2 Unit	Baik				1 Unit	Baik
4	Standar Tool ( Selang Semprot)	2 Unit	Baik					Baik
5	Rol Meter (Figo Besar 100m )	2 Buah	Baik					Baik
6	Rol Meter (Figo Kecil 50m)	3 Buah	Baik					Baik
7	Global Positioning System ( Garmin Oregon 550 )	1 Unit		Rusak			1 Unit	Baik
8	Soud System (Pioner Wireless, BBM Saound Speaker, BBM Amplifier )	1 Unit	Baik					Baik
9	Unit Power Supply (UPS) Power Tree 600w	2 Unit	Baik					Baik
10	Alat Pemadam Kebakaran (Pyramid 9 Kg )	3 Buah	Baik				5 Buah	Baik
11	Alat Pemadam Kebakaran (Pyramid 6 Kg )	1 Buah	Baik					Baik
12	Alat Pemadam Kebakaran (Pyramid 3 Kg )	1 Buah	Baik					Baik
PERALATAN KANTOR								
1	Mesin Ketik Manual Portable	2 Unit	Baik					Baik

	(Brother 13")							
2	Lemari Besi (Brother 2 Pintu)	4 Unit	Baik				2 Unit	Baik
3	Lemari Besi (Brother 4 Pintu)	8 Unit	Baik					Baik
4	Rak Besi (Siku Bolong 3 Tingkat)	2 Set	Baik					Baik
5	Rak Kayu (Rak TV 608 Exclusive )	2 Unit	Baik					Baik
6	Brankas ( Dragon )	1 Unit	Baik					Baik
7	Papan Visual (Display Posko Bencana)	1 Unit	Baik					Baik
8	Papan Nama Instansi	1 Unit	Baik					Baik
9	Mesin Absensi (finger Print)	1 unit		Rusak			1 Unit	Rusak
10	White Board	2 Unit	Baik					Baik
11	Meja Kayu/Rotan ( ½ Biro )	2 Unit	Baik				5 Unit	Baik
12	Kursi Rapat ( chitose )	3 Unit	Baik				10 Unit	Baik
13	Kursi Putar (Babyku MS 8000s)	7 Unit	Baik					Baik
14	Kursi putar	5 Unit	Baik					Baik
15	Meja piket	1 Unit	Baik					Baik
16	Meja Biro/ Meja Kerja (1/2 Biro )	12 Unit	Baik				6 Unit	Baik
17	Meja Biro / Meja Kerja ( Murano 1/5 Biro )	2 Unit	Baik					Baik
18	Sofa (Kursi Jati Hongkong)	1 Set	Baik					Baik
19	Sofa (Kursi Jati Hongkong )	1 Set	Baik					Baik
20	Kaca Riben	2 Buah	Baik					Baik
21	Kasur Aluminium (Velbed)	10 Unit	Baik					Baik
22	Jam Mekanis	1 Unit	Baik					Baik
23	Jam Elektronik	1 Unit	Baik					Baik
24	AC Split (Sharp AUA9MEY)	1 Unit	Baik					Baik
25	AC Split (LG 1 PK)	2 Unit	Baik					Baik
26	Kipas Angin (Miyako KADI 1227B)	1 Unit	Baik				2 Unit	Baik
27	Kipas Angin (Miyako KADI 1227B)	1 Unit		Rusak			2 Unit	Baik
28	Wireless	1 Unit	Baik					Baik
29	Megaphone (TOA 2015s)	2 Unit	Baik					Baik
30	Megaphone (TOA ZR2015s)	2 Unit	Baik					Baik
31	Camera Film ( Fuji AX350)	1 Unit	Baik					Baik
32	Camera Film (Nikon D3100)	1 Unit	Baik					Baik
33	Hendy Cam (Sony DCR-PJ5E)	1 Unit	Baik					Baik
34	Ascender	2 Pasang	Baik					Baik
35	Carabiner 23 kn,Screw Type	4 Buah	Baik					Baik
36	Caramentle Semi Statis 10,5 mm	2 Rol	Baik					Baik

37	Double Pulley	4 Set	Baik					Baik
38	Figura 8/ Descender	3 Set	Baik					Baik
39	Full Body Hardness	2 Set	Baik					Baik
40	Set Hardness	2 Set	Baik					Baik
41	Single Pully	3 Set	Baik					Baik
42	Webbing 4,5 Meter	4 Set	Baik					Baik
43	Kursi Putar Indachi	2 Unit	Baik					Baik
44	Lemari Buku BC10 Topic	2 Unit	Baik					Baik
45	Senter (Papilon LED)	10 Unit		Rusak			10 Unit	Rusak
46	Emergency Lamp Maspion 89 LED	4 Unit	Baik				10 Unit	Baik
47	Bendera Merah Putih	3 Unit	Baik					Baik
48	Tandu	2 Unit	Baik				5 Unit	Baik
49	Kanopi (Gaarasi Mobil Damkar Kantor Gedung Tataan )	1 Unit	Baik					Baik
50	Buku Ilmu Pengetahuan	1 Unit	Baik					Baik
51	Peta Wilayah( Peta Kabupaten Pesawaran)	1 Buah	Baik					Baik
52	Peta Wilayah (Peta Profinsi Lampung)	1 Buah	Baik					Baik
53	Mesin Faxcimile Panasonic KX-FP701	1 Buah	Baik					Baik
54	Mesin Faxcimile Panasonic KX-FT983CX	1 Buah	Baik					Baik
55	LCD Sharp 32"	1 unit	Baik					Baik
56	AC Panasonic Inverter CS S10PKP	1 Unit	Baik					Baik
57	UPS APC1100	1 Unit	Baik					Baik
58	VHF Tranceiver (Icom IC-V22oH, Antena Hygai V2R USA)	1 Set	Baik					Baik
59	Unit Pemancar UHF Portable	1 Unit	Baik					Baik
60	DC Power Supply GP Akai GP 30AD	1 Buah	Baik					Baik
61	DC Power Supply GP Akai GP 40AD	1 Buah	Baik					Baik
62	Pelampung	15 Buah	Baik					Baik
63	Pesawat Telepon merk Saitel	1 Unit	Baik					Baik
64	Helm BNPB	4 Buah	Baik				10 Buah	Baik
65	Antena UHF Portable	1 Buah	Baik					Baik

66	Lambang Garuda Pancasila	1Unit	Baik					Baik
67	Dispenser (Miyako)	1 Unit	Baik					Baik
68	Handy Camp (Sony DCR-PJ5E)	1 Unit	Baik					Baik
69	Lambang Instansi	2 Buah	Baik					Baik
70	Handy Talky (Icom ICV80)	12 Unit		Rusak			10 Unit	Rusak
	TENDA							
1	Tenda Keluarga	5 Set	Baik					Baik
2	Tenda Pleton	2 Set	Baik				1 Set	Baik
3	Tenda Posko	1 Set	Baik				1 Set	Baik
4	Tenda Regu	3 Set	Baik					Baik
5	Tenda Pengungsi	1 Set	Baik				2 Set	Baik
	ALAT DAPUR KANTOR							
1	Gelas	1 Lusin		Rusak			3 Lusin	Baik
2	Nampan	2 Buah	Baik					Baik
3	Sendok / Garpu	1 Lusin	Baik					Baik
4	Tatakan Gelas	1 Lusin	Baik					Baik
5	Piring	1 Lusin	Baik				2 Lusin	Baik
6	Bak Penampung Air	1 Unit	Baik					Baik
	ALAT ELEKTRONIK KANTOR							
1	FC Unit (Intel Core 2 Duo)	2 Unit	Baik				4 Unit	Baik
2	FC Unit (Intel Core i3)	1 Unit	Baik					Baik
3	Laptop (Toshiba Satelit L745 Core i5)	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
4	Laptop (Toshiba Intel Core I3)	1 Unit	Baik				1 Unit	Baik
5	Laptop (Acer Aspire E14)	1 Unit	Baik					Baik
6	Laptop (Acer Aspire V5 Touch)	1 Unit	Baik					Baik
7	Laptop (HP Elite Book 820 G )	1 Unit	Baik				2 Unit	Baik
8	Printer (HP Laser Jet P1102 )	4 Unit	Baik					Baik
9	Printer Canon Pixma Mp 258	1 Unit	Baik				2 Unit	Baik
10	Monitor HP Pro Display P17A	1 Unit	Baik					Baik
11	TV Samsung LED 32"	1 Unit	Baik					Baik
12	TV Samsung LED 32"	1 Unit		Rusak			1 Unit	Rusak
13	PC Unit	1 Unit	Baik					Baik

Mengingat banyaknya peralatan/sarana dan prasarana yang sudah dimiliki dan harus dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pesawaran dalam rangka penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran, kebutuhan gedung kantor serta gudang peralatan dan logistik yang permanen dan definit sudah sangat dibutuhkan, hal ini untuk meningkatkan pelayanan serta pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan/sarana prasarana penanganan penanggulangan bencana. Dengan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan peralatan dan sarana/prasaran penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Pesawaran terus meningkatkan koordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan peralatan dan sarana/prasarana penanggulangan bencana.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kabupaten Pesawaran menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pesawaran dapat diidentifikasi ke dalam 4 kawasan, yaitu : kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gempa bumi, dan kawasan rawan bencana tanah longsor.

1. Kawasan rawan bencana tsunami, meliputi:
  - a. kawasan pesisir Kecamatan Punduh Pedada dan Marga Punduh dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; dan
  - b. kawasan pesisir Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
2. Kawasan rawan bencana banjir dengan luas kurang lebih 24.954 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.



3. Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.
4. Kawasan rawan bencana tanah longsor berupa kawasan gerakan tanah kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi di Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Khilau, Kecamatan Way Lima.

Tabel 2.3  
INTENSITAS BENCANA DI KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2016 – 2020

No	Jenis Bencana	Tahun Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	24	50	32	7	32
2	Banjir Rob	-	-	-	-	3
3	Banjir dan Longsor	1	-	4	-	-
4	Kebakaran Rumah	4	-	10	17	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	1	22	-
6	Angin Puting Beliung	1	-	3	2	3
7	Longsor	1	-	6	1	4
8	Orang Tenggelam	1	-	-	-	-
9	Tsunami	-	-	1	-	-
10	Rumah Roboh	-	-	1	1	1
Jumlah		32	50	58	50	43

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan bencana periode 2016-2021, antara lain adalah :

### 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dan aparat tentang penanggulangan bencana, terlaksananya koordinasi sektoral (BPBD Provinsi Lampung dan BNPB) dan koordinasi lintas sektoral (SKPD terkait, Ormas, dan pemangku kepentingan lainnya), serta tersusunnya regulasi/aturan dan atau kebijakan Penanggulangan Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

- a. Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana)
- b. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesawaran dan Apel siaga Bencana
- c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparat terhadap Penanggulangan Bencana
- d. Posko Siaga Bencana
- e. Pelatihan manajemen bencana

### 2. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pemantuan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
- b. Pemetaan wilayah rawan bencana dan pemasangan rambu jalur evakuasi
- c. Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bahaya Kebakaran
- d. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran
- e. Simulasi / Gelar Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- f. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah

Longsor

g. Pembentukan tim relawan masyarakat tangguh bencana

### 3. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pembentukan dan Operasional Tim reaksi cepat (TRC) darurat bencana
- b. Posko tanggap darurat terhadap kerawanan/kejadian bencana kekeringan dan musim hujan
- c. Pengadaan peralatan bencana dan mountenering
- d. Droping air bersih tanggap darurat bencana dan musibah kekeringan
- e. Pengadaan logistik untuk korban bencana

### 4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Identifikasi dan verifikasi Pasca Bencana
- b. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan membangun jembatan, sumur bor, dan embung di daerah yang terkena dampak bencana.
- c. Sosialisasi traumatik pasca bencana kepada unsur kecamatan, desa dan masyarakat/tokoh agama.

## 1. Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 -2020

Tabel. 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k/a	g/b	h/c	i/d	j/e
1	Penyusunan Rencana Kontigensi	Penyusunan Rencana Kontigensi Banjir dan Longsor	100%					100%					100%				
2	Operasional Satgas Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Operasional Satgas Penanggulangan Bencana		100%		100%	100%		100%		99,99%	100%		100%		99,99%	100%
3	Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bahaya Kebakaran	Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bahaya Banjir	100%					100%					100%				
4	Penyusunan Peraturan Bidang Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Peraturan Bidang Penanggulangan Bencana	100%					100%					100%				

5	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana		100%	100%	100%	100%		99,58%	99,88%	99,94%	100%		99,58%	99,88%	99,94%	100%
6	Pengembangan Web Site Penanggulangan Bencana	Tertindakannya Pengembangan Web Site Penanggulangan Bencana		100%	100%	100%			96%	100%	100%			96%	93%	100%	
7	Identifikasi ,Verifikasi dan Sosial Pasca Bencana	Terselenggaranya Pelatihan Konseling Traumatik Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%		100%	100%	100%	96,55%	
8	Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Tertindakannya Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		100%		100%			100%		100%			100%		100%	
9	Pengadaan Buffer Stock Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Buffer Stock Logistik Korban Bencana		100%	100%	100%	100%		93.14%	90%	99,94%	99.05%		93.14%	90%	99,94%	99.05%
10	Operasional Posko Siaga Bencana dan TRC	Terselenggaranya Upaya Penanganan Bencana Secara Dini dan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99,80%	99,21%	99,58%	51,53%	95%	99,80%	99,21%	99,58%	51,53%
11	Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana		100%	100%				100%	100%				100%	100%		

12	Penanganan Pasca Bencana	Terfasilitasinya Penanganan Pasca Bencana		100%	100%	100%			100%	100%	92,02%			100%	100%	92,02%	
13	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana		100%	100%	100%	100%		3,70%	98,20%	0%	98,35%		3,70%	98,20%	0%	98,35%
14	Operasional PUSDALOPS-PB	Terfasilitasinya Operasional PUSDALOPS-PB		100%	100%				98,96%	99,98%				98,96%	99,98%		
15	Fasilitasi Program Nasional Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Program Nasional Penanggulangan Bencana			100%	100%	100%			83,64%	99,89%	100%			83,64%	99,89%	100%
16	Apel Siaga Bencana	Terlaksananya Apel Siaga Bencana			100%		100%			99,87%		100%			99,87%		100%
17	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana					100%					99,84%					99,84%
18	Penyusunan Peta Rawan Bencana	Tersedianya Peta Rawan Bencana					100%					100%					100%

Pelayanan SKPD BPBD Kabupaten Pesawaran dimulai pada tahun 2012, mengingat BPBD Kabupaten Pesawaran baru terbentuk berdasarkan Perda No. 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Kabupaten Pesawaran. Pelayanan penanggulangan bencana sebelumnya melekat pada Badan Kesbangpol dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran.

Target capaian kinerja BPBD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 – 2021 belum tercapai maksimal hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. BPBD Kabupaten Pesawaran belum memiliki gedung kantor dan Gudang Peralatan dan logistik yang definitif dan permanen, masih menempati gedung sewa sementara dengan fasilitas yang sangat terbatas;
2. Dukungan dan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Pesawaran masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun Kualitas dengan dukungan anggaran yang masih terbatas pula;
3. Kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang ada belum memadai, mengingat regulasi/aturan/pedoman dan mekanisme/kebijakan penyelenggaraan bencana penanggulangan bencana masih dalam tahap penyusunan;
4. Kerjasama-kerjasama dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum dilakukan secara intens dan optimal;
5. Orientasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada masih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Pesawaran, mengalami dinamika dengan kecenderungan terus meningkat, sebagaimana tabel berikut.

## 2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.5

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	f/a	g/b	h/c	i/d	j/e
Penyusunan Rencana Kontigensi	77.095.000					67.405.000					87%				
Operasional Satgas Penanggulangan Bencana		124.300.000		180.450.000	136.740.000		124.300.000		180.439.500	136.740.000		100%		99,99%	100%
Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bahaya Kebakaran	253.000.000					245.700.000					97%				
Penyusunan Peraturan Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000					29.100.000					97%				
Pengembangan Desa Tangguh Bencana		71.700.000	142.000.000	232.250.000	9.900.000		71.400.000	141.830.000	232.100.000	9.900.000		99,58%	99,88%	99,94%	100%
Pengembangan Web Site Penanggulangan Bencana		10.000.000	15.000.000	6.800.000			9.600.000	15.000.000	6.800.000			96%	100%	100%	
Identifikasi, Verifikasi dan Sosial Pasca Bencana	67.920.000	58.775.000	100.000.000	50.000.000		67.920.000	58.775.000	100.000.000	48.275.000		100%	100%	100%	96,55%	
Sosialisasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		39.500.000		44.950.000			39.500.000		44.950.000			100%		100%	
Pengadaan Buffer Stock Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana		60.500.000	75.000.000	175.000.000	89.500.000		56.350.000	67.500.000	174.895.000	88.650.000	100%	93,14%	90%	99,94%	99,05%
Operasional Posko Siaga Bencana dan TRC	177.113.000	74.400.000	145.000.000	120.248.300	58.900.000	155.988.000	74.250.000	143.850.000	119.748.300	30.350.000	88,07%	99,79%	99,21%	99,58%	51,53%
Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana		30.000.000	30.000.000				30.000.000	30.000.000				100%	100%		
Penanganan Pasca Bencana		31.500.000	100.000.000	33.900.594			31.500.000	100.000.000	31.196.800			100%	100%	92,02%	
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana		14.000.000.000	13.482.277.800	9.580.000.000	9.580.000.000		517.722.200	13.239.308.400	-	9.421.756.300	95%	3,69%	98,20%	0%	98,35%
Operasional PUSDALOPS-PB		150.000.000	243.000.000				148.440.000	242.947.500				98,96%	99,98%		
Fasilitasi Program Nasional Penanggulangan Bencana			40.000.000	20.840.000	15.000.000			33.455.000	20.816.300	15.000.000			83,64%	99,89%	100%
Apel Siaga Bencana			50.000.000		20.000.000			49.935.000		20.000.000			99,87		100%
Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana					15.275.000					15.250.000			99,98%		99,84%
Penyusunan Peta Rawan Bencana					123.602.000					123.602.000			83,64%		100%



Pada tahun 2019 terdapat Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, kegiatan ini bersumber dari bantuan dana hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2019. BPBD Kabupaten Pesawaran menerima bantuan dana hibah kegiatan ini sebesar Rp 9.580.000.000,- (sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima di rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada bulan Desember 2019, dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas bulan) yakni sampai dengan bulan Desember 2020. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini digunakan untuk membangun sebanyak 137 unit rumah di pulau legundi yang terkena dampak tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 lalu. Kegiatan ini belum dilaksanakan karna masih dalam proses lelang. sehingga pencapaian rasio realisasi anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun 2019 adalah 0%. Pada tahun Anggaran 2020 kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dapat ter-realisis menjadi 98,35%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD pada BPBD Kabupaten Pesawaran adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam penanganan penanggulangan bencana. Keterbatasan penganggaran untuk penanggulangan bencana dalam hal dana siap pakai atau on call. Dana tersebut sangat diperlukan segera jika terjadi bencana, namun aturan yang mendasari adanya penganggaran dan penggunaan dana siap pakai dalam SKPD di Kabupaten Pesawaran belum memungkinkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum optimal.

## 3. Analisis terhadap Dokumen RT/RW

Tabel 2.6  
HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN  
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai		Pegembangan jalur evakuasi bencana;	pembangunan jalur evakuasi direncanakan sesuai kebutuhan karena banyak jalur evakuasi yang sudah rusak saat ini. Pembangunan jalur evakuasi sangat mendukung kelancaran proses evakuasi jika suatu saat terjadi bencana.	Kec. Padang Cermin, Kec. Marga Punduh, Kec. Punduh Pedada Kec. Teluk Pandan
2	penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi		Penyediaan sarana evakuasi bencana	penambahan penyediaan sarana evakuasi berupa TEA karena saat ini masih sangat kurang dayaampungnya terutama di luar kawasan bencana sebagai daerah aman.	Kec. Padang Cermin, Kec. Marga Punduh, Kec. Punduh Pedada Kec. Teluk Pandan
3	penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana		pengembangan sistem informasi tanggap bencana	Sistem yang terbangun akan memberikan kemudahan dalam pendataan, pemetaan dan proses evakuasi.	
4	pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana		penguatan kelembagaan penanganan bencana		Kec. Padang Cermin, Kec. Marga Punduh, Kec. Punduh Pedada Kec. Teluk Pandan

5	Pengembangan kawasan rawan bencana alam	pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi	mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi	Identifikasi dan penetapan wilayah rawan bencana alam gempa bumi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan SKPD	
			mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa	memngurangi resiko rumah rusak akibat gempa bumi	
			membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	Pembangunan Sistem Informasi Desa untuk desa-desa di daerah rawan dan aman sangat berpengaruh kelancaran pelayanan publik di desa masing-masing yang di dukung oleh <b>OPRB Desa</b> .	
		pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah	mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah	Identifikasi dan penetapan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan SKPD	
			menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun	Penghijauan kembali lahan-lahan rawan gerakan tanah sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng	
			membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat	Pembangunan Sistem Informasi Desa untuk desa-desa di daerah rawan dan aman sangat berpengaruh kelancaran pelayanan publik di desa masing-masing yang di dukung oleh <b>OPRB Desa</b> .	

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan);
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Gambar 3.1  
Sistem Penanggulangan Bencana



Sistem penanggulangan bencana berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. Komponen legislasi mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
2. Komponen kelembagaan terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
3. Komponen perencanaan terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari Tingkat Nasional, Propinsi sampai dengan Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;
4. Komponen pendanaan, untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi perusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. Pengembangan kapasitas, baik secara kuantitas maupun kualitas hendaknya dilaksanakan disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan "urusan bersama", semua pihak baik masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta, dimana tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran, menerangkan tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Pesawaran dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut :

1. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan.
2. Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
3. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2011, BPBD Kabupaten Pesawaran pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis.

Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Pesawaran maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesawaran yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Pesawaran harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya di BPBD Kabupaten Pesawaran jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Pesawaran yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana,
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Pesawaran,
3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Kabupaten Pesawaran,
4. Belum adanya gedung permanen untuk BPBD yang berfungsi sebagai kantor dan gudang penyimpanan logistik dan peralatan bencana,
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana,
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pesawaran,
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran,
8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Pesawaran,
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran,
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pesawaran,

11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran, serta belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.



Tabel. 3.1

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK FUNGSI  
BPBD KABUPATEN PESAWARAN**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Belum semua SDM BPBD mendapatkan pelatihan tentang PB	Semua pejabat struktural maupun staf mendapatkan pengetahuan dan pelatihan tentang PB dan standar minimal personil BPBD 50 orang	SDM yang ada latar pendidikannya tidak mendukung dalam penanganan bencana, dan jumlah personil 15 orang belum memadai	Keterbatasan anggaran untuk keikutsertaan personil BPBD mengikuti diklat tentang PB dan terbatasnya perekrutan CPNS untuk tenaga teknis	Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai
	Pelaporan belum satu pintu masih dilaksanakan oleh masing-masing bidang	Mekanisme pelaporan dan pendataan kebakaran ke Provinsi dan Pusat menggunakan sistem informasi kebakaran yang terprogram	Sistem yang belum berjalan dan keterbatasan SDM pengelola data dan pelaporan kebakaran	Akses internet yang kurang memadai	Belum terintegrasi Dan terstandarisasinya mekanisme/ sistem pelaporan data dan informasi kebakaran di Kabupaten Pesawaran
	Dana Siap Pakai untuk kebakaran belum ada di BPBD	Dalam penanggulangan bencana harus disediakan dana siap pakai khusus yang berada di BPBD	pengelolaan DSP tidak ada di SKPD BPBD	Aturan permendagri tidak ada yang mengatur DSP adanya di SKPD BPBD	Belum memadainya dukungan anggaran Dana Daurat (DSP) di BPBD Kabupaten Pesawaran
	Kantor BPBD serta Gudang logistik dan peralatan masih menyewa rumah penduduk belum memenuhi standar	Adanya Kantor serta gudang logistik dan peralatan yang memadai	Keterbatasan bangunan dan ruangan untuk kantor dan gudang	Keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung kantor BPBD dan Gudang logistik	Belum terfasilitasinya gedung untuk kantor BPBD dan gudang yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana

	Peralatan penanganan bencana dan kendaraan operasional PB masih Terbatas	Peralatan dan kendaraan kebencanaan yang lengkap dan memadai	Keterbatasan anggaran dan tempat penyimpanan/gudang	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan bencana dan kendaraan operasional PB	Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
	Logistik pangan dan non pangan saat ini untuk ebutuhan dasar masyarakat terdampak sangat terbatas	Standar kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus terpenuhi semuanya	Keterbatasan anggaran & tempat penyimpanan/gudang	kejadian encana tidak dapat di prediksi	Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pesawaran
	Regulasi dan Dokumen penyelenggaraan PB masih lengkap dan terperinci	Adanya Perda yang mengatur tentang PB, SOP penanggulangan Bencana	keterbatasan SDM dan anggaran untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang PB	Kajian dari tim ahli yang mengerti tentang PB	Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penangglangan bencana di Kabupaten Pesawaran
	Baru 10 Desa tangguh bencana yang Terbentuk	seluruh desa Rawan Bencana di Kabupaten Pesawaran menjadi Desa Tangguh Bencana	Penysunan Anggaran yang mengacu pada Skala prioritas	persyaratan menjadi destana yang belum ada di Desa	Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Pesawaran
	Baru beberapa SDM yg kompeten di bidang PB	seluruh SDM di BPBD kompeten di bidang PB	Kemampuan SDM terbatas	Kurangnya diklat tentang PB yang diikuti oleh SDM BPBD	Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penangglangan bencana di Kabupaten Pesawaran
	Rehab dan Rekon baru sebagian yg bisa dikerjakan	Tempat pengungsian dan jalur evakuasi tersedia dan memadai	Kemampuan SKPD untuk Melaksanakan Upaya rehab rekon sangat terbatas	Keterbatasan anggaran APBD	Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pesawaran
	Peran serta masyarakat dan dunia usaha hanya sebatas dalam kegiatan PB belum memberikan kontribusi yg optimal	Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam PB	Tidak semua kegiatan PB melibatkan dunia usaha dan sebagian kecil masyarakat.	Dunia Usaha Belum mengetahui Tentang keterlibatannya dalam PB	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penangglangan bencana di Kab. Pesawaran

	Peran 10 sektor belum maksimal	10 sektor PB Dapat bekerjasama dalam kegiatan dalam Penggulangan bencana	Belum semua Kegiatan SKPD melibatkan 10 sektor	SKPD 10 sektor belum mengerti dan faham akan tupoksinya dalam PB	Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

## 3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Pesawaran serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Visi Pembangunan yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”**

Dalam rumusan visi Kabupaten Pesawaran 2021-2026 tersebut terdapat 3 (tiga) kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi, yaitu Maju, Sejahtera dan Masyarakat Produktif.

Penjelasan masing-masing pokok visi dapat disajikan pada tabel berikut :

POKOK-POKOK VISI	RUMUSAN PENJELASAN VISI
Maju	Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdaya guna.
Sejahtera	Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah.
Masyarakat Produktif	Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya di sekitarnya menuju kemandirian ekonomi.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026, ditetapkan 5 (lima) Misi yang di susun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah, yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu – isu strategis, faktor – faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun

eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut. Sebab pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah, yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

Misi Kedua: Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah dengan menyediakan aksesibilitas dan konektivitas pada wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata, akses terhadap ketahanan air, dan akses terhadap infrastruktur dasar berkualitas yang berkeadilan dan merata dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Misi Ketiga: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.

Misi ini adalah upaya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender, serta meningkatnya daya beli dan standar hidup layak

masyarakat sehingga tercipta ketentraman, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Misi Keempat: *Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.*

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta nilai investasi pada sektor prioritas agribisnis, industri, dan pariwisata serta mempermudah dan menjamin iklim investasi di seluruh wilayah.

Misi Kelima: Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Misi ini untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa berbasis kemasyarakatan dan Potensi lokal yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam penjabaran Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026, isu penanggulangan bencana ada pada koridor misi kelima yakni 'Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.' dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada diurus 'Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat'

Dalam pencapaian misi kelima tersebut ditetapkan isu-isu strategis bidang penanggulangan bencana yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dari ancaman bencana dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara profesional, terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Tabel 3.2

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH**

<b>VISI : "Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif"</b>				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Program Penanggulangan Bencana	Kapasitas kelembagaan PB belum memadai dan relatif masih baru	Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang PB masih minim	Penyusunan Regulasi dan Kebijakan tentang PB serta Sosialisai PB lebih intensif
		Upaya Penanggulangan Bencana masih terfokus pada tahap tanggap darurat	Koordinasi dan Kerjasama Lintas sektoral dan lintas wilayah belum terlaksana secara optimal	Peningkatan Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam PB
		Pemanfaatan IPTEK dalam bidang PB masih minim	Keterbatasan sarana dan prasarana IPTEK yang ada belum memadai	Penyediaan Sarana/prasarana serta Optimalisasi Pemanfaatan IPTEK
		Data kebencanaan yang ada di SKPD belum memadai	Belum terpetakan secara akurat wilayah rawan bencana	Sosialisasi dan Pembinaan di wilayah rawan bencana
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaporan kinerja dan realisasi kegiatan dari masing- masing bidang mengalami keterlambatan	Keterbatasan SDM dan personal secara kualitas dan kuantitas yang menangani kegiatan	Tambahan personil yang berkualitas pada SKPD
		SDM yang ada di SKPD belum memiliki Pengetahuan dan Keterampilan yang memadai tentang PB	Kurangnya Personil dan terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan Bidang PB	Tambahan Personil dan anggaran untuk kegiatan pelatihan PB bagi SDM BPBD
		Terbatasnya ruang pelayanan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana PB	Belum tersedia nya gedung kantor / gudang Logistik dan peralatan yang definitive/permanen	Penyediaan bangunan Kantor dan Gudang Logistik /peralatan
		Kinerja SDM SKPD belum optimal	SDM SKPD kurang memahami aturan kedisiplinan	Peningkatan kinerja SDM SKPD dengan Peningkatan disiplin
		Pelayanan SKPD kurang optimal dalam hal pelayanan kantor	Keterbatasan sarana prasarana yang ada	Tambahan Anggaran untuk Pengadaan sarana prasarana

### 3.3. PENENTUAN ISSU-ISSU STRATEGIS

Isu - Isu Strategis yang dihadapi BPBD Kabupaten Pesawaran sampai dengan tahun 2021 ini antara lain :

1. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran;
2. Belum tersedia gedung Kantor BPBD dan Gudang yang definitif dan permanen yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat dan penyimpan logistik dan peralatan bencana;
3. Belum lengkapnya regulasi/aturan/kebijakan/ pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran;
4. Masih terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) bidang penanggulangan di Kabupaten Pesawaran baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Belum memadainya dukungan anggaran yang dikelola BPBD Kabupaten Pesawaran;
6. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana, Sekolah tangguh Bencana serta Relawan Bencana di Kabupaten Pesawaran;
7. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
8. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pesawaran;
9. Belum memadainya dan optimalnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pesawaran mengingat besarnya anggaran dan kompleksitas kegiatan yang dibutuhkan untuk upaya Rehab Rekon;
10. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Pesawaran;
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.



## BAB IV

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

## 4.1. VISI DAN MISI BUPATI PESAWARAN

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk periode tahun 2021-2026 adalah: "Pesawaran Lebih Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakat Yang Produktif".

## 4.2. MISI

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi masa lalu, dan saat ini untuk menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi yang dirumuskan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2021–2026 adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi
2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah
5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih periode 2021–2026, BPBD Kabupaten Pesawaran menetapkan program dan Kegiatan pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Pesawaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2021–2026) sesuai visi dan misi Bupati Pesawaran 2021 – 2026 yaitu:

Program Penanggulangan Bencana :

- 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
  - a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana
  - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
  - b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten
  - c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten
  - d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - e. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - f. Penanganan Pascabencana Kabupaten
  - g. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten
  - h. Penyusunan Rencana Kontijensi
  - i. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
  - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
  - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten
  - c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

#### 4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

##### A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 misi (5) Lima yaitu : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

##### B. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026, yaitu Meningkatnya Kemandirian Desa

#### 4.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran dirumuskan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 misi ke (5) lima yaitu Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 -2026 antara lain :

1. Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, dengan kebijakan Mewujudkan Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Terpadu.
2. Pelibatan swadaya masyarakat terhadap pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa serta pengurangan resiko bencana,dengan kebijakan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana serta ketentraman dan ketertiban umum

lebih jelasnya, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah BPBD Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah.

**Tabel 4.1.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

SKPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

VISI : PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF				
Misi 1 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Bekinerja Tinggi				
	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Terpadu
Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika				
2.	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya kemandirian desa	Pelibatan swadaya masyarakat terhadap pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa serta pengurangan resiko bencana	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana serta ketentraman dan ketertiban umum

**Tabel 4.2.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

SKPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

VISI : PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF				
Misi 1 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Bekinerja Tinggi				
	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan perencanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani
			Pembangunan atau Pengembangan SPBE dan Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan penyediaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penyesuaian terhadap dampak kebiasaan baru Pandemi Covid19.
			Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatkan Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN dengan tetap memperhatikan kebiasaan baru akibat dampak Pandemi Covid-19.
			Peningkatan Pengawasan dan Ketaatan Penggunaan e- Procurement terhadap Belanja Pengadaan, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Menguatkan pengawasan internal pemerintah. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
			Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal dan terpercaya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern	Menyediakan LKPD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern
			Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Seluruh OPD dengan memperhatikan kebiasaan baru akibat Pandemi Covid-19
Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika				
2.	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya kemandirian desa	Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Kemasyarakatan	Meningkatkan pengelolaan keuangan desa sesuai standar dan menyediakan Dana Stimulus dalam mengembangkan BUMDes.
			Pelibatan swadaya masyarakat terhadap pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa serta pengurangan resiko bencana	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya digitalisasi pengembangan Potensi Desa dan Kearifan Lokal
			Peningkatan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana serta ketentraman dan ketertiban umum
				Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis dari kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan atau ditargetkan tercapai. Penyusunan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Pesawaran disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pesawaran yang berfungsi sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Lampung.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pesawaran dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, penanganan bencana serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Sebagai penjabaran dari program disusunlah Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan yang terpilih dalam suatu program yang diselenggarakan BPBD Kabupaten Pesawaran sebagai langkah dalam pencapaian sasaran. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Renstra BPBD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penanggulangan Bencana
  - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
    - Penyusunan Kajian Resiko Bencana
    - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)
  - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
    - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten
  - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Penanganan Pascabencana Kabupaten
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten
  - Penyusunan Rencana Kontijensi
  - Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- d) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencan
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
  - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten
  - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Selengkapnya Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Pesawaran beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021 - 2026 sebagaimana Tabel 5.1. di bawah ini

Tabel 5.1.

## Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD Beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021 - 2026

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Priode	Lokasi (Diisi yg sasarnya desa/kec)				
									2021		2022		2023		2024		2025		2026							
									Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Desa Tangguh Bencana	%	100%	100%	248.190	100%	1.198.000	100%	2.025.500	100%	2.310.500	100%	2.865.500	100%	2.895.500						
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	%	100%	100%	-	100%	-	100%	150.000	100%	165.000	100%	185.000	100%	400.000						
					Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000		
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi	-	-	-	-	1	150.000	1	165.000	1	185.000	1	200.000							
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	100%	100%	58.500	100%	748.000	100%	1.130.500	100%	1.310.500	100%	1.765.500	100%	1.490.500						
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	-	-	-	1	200.000	-	-	-	-	-	1	275.000	-	-					
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan/Angkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan/Angkatan	-	-	-	1	40.000	1	60.000	1	80.000	1	100.000	1	120.000						
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyediaan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana (EWS)	Unit	-	-	-	1	100.000	2	225.000	2	250.000	2	275.000	2	300.000						
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana	Peralatan	-	-	-	2	50.000	2	65.000	2	80.000	2	95.000	2	110.000						

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	-	-	-	11	98.000	11	150.000	11	200.000	11	250.000	11	300.000		
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan jitupasna	Orang	-	-	-	30	-	30	-	30	-	30	-	-	-		
	penyusunan dokumen renaksi (R3P)	Dokumen	-	-	-	1	100.000	-	120.000	1	140.000	1	160.000	-	-		
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rakor	1	1	58.500	1	60.000	2	235.500	2	235.500	2	235.500	2	235.500		
Penyusunan Rencana Kontijensi	jumlah dokumen rencana kontijensi	Dokumen	0	0	-	0	-	1	150.000	1	175.000	1	200.000	1	225.000		
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah Simulasi dan Apel Kesiapsiagaan Bencana	Kegiatan	-	-	-	2	100.000	2	125.000	2	150.000	2	175.000	2	200.000		
<b>Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	%	-	-	<b>189.690</b>	<b>100%</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>	<b>380.000</b>	<b>100%</b>	<b>410.000</b>	<b>100%</b>	<b>430.000</b>	<b>100%</b>	<b>460.000</b>		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Operasional Satgas dan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Orang	18	18	107.565	18	200.000	18	210.000	18	220.000	18	230.000	18	240.000		
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Korban Bencana	Item	3	3	82.125	3	150.000	3	170.000	3	190.000	3	200.000	3	220.000		
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Prosentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	%	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100.000</b>	<b>100%</b>	<b>365.000</b>	<b>100%</b>	<b>425.000</b>	<b>100%</b>	<b>485.000</b>	<b>100%</b>	<b>545.000</b>		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Regulasi	-	-	-	-	-	1	65.000	1	75.000	1	85.000	1	95.000		
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Kerjasama Kemitraan	Forum	-	-	-	-	-	1	175.000	1	200.000	1	225.000	1	250.000		
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi pengelolaan Sistem Informasi Bencana Daerah	Aplikasi	-	-	-	1	100.000	1	125.000	1	150.000	1	175.000	1	200.000		

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Predikat Sakip, Indeks SPBE, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini BPK-RI, Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	%	100%	100%	2.274.693	100%	2.557.689	100%	2.850.990	100%	2.979.957	100%	3.081.621	100%	3.195.152		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	%	100%	100%	-	100%	20.000	100%	30.000	100%	40.000	100%	50.000	100%	60.000			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	4	10.000	4	15.000	4	20.000	4	25.000	4	30.000			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	-	-	-	4	10.000	4	15.000	4	20.000	4	25.000	4	30.000			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada	%	100%	100%	1.814.660	100%	1.773.458	100%	1.802.424	100%	1.822.181	100%	1.843.414	100%	1.866.271			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	1.723.460	12	1.644.848	12	1.644.848	12	1.644.848	12	1.644.848	12	1.644.848			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Bulan	12	12	91.200	12	123.610	12	147.576	12	162.333	12	178.566	12	196.423			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Laporan	-	-	-	2	5.000	2	10.000	2	15.000	2	20.000	2	25.000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	%	100%	100%	-	100%	-	100%	70.000	100%	85.000	100%	100.000	100%	115.000			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	-	-	-	-	-	35	50.000	35	60.000	35	70.000	35	80.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kali	-	-	-	-	-	2	20.000	2	25.000	2	30.000	2	35.000							

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26.093</b>	<b>100%</b>	<b>130.592</b>	<b>100%</b>	<b>153.101</b>	<b>100%</b>	<b>176.311</b>	<b>100%</b>	<b>199.742</b>	<b>100%</b>	<b>223.416</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	576	12	2.000	12	3.000	12	4.000	12	5.000	12	6.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana kerja	Item	11	11	9.078	50	20.092	55	22.101	60	24.311	65	26.742	70	29.416		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga	Item	-	-	-	16	2.000	25	3.000	30	4.000	35	5.000	40	6.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan bahan logistik kantor	Bulan	12	12	1.989	12	15.000	12	20.000	12	25.000	12	30.000	12	35.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Barang Cetak dan Penggandaan	Item	6	6	6.040	6	7.500	6	10.000	6	13.000	6	16.000	6	19.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bulan	12	12	6.000	12	9.000	12	10.000	12	11.000	12	12.000	12	13.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kali Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	12	12	2.410	20	75.000	25	85.000	30	95.000	35	105.000	40	115.000		
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>86.000</b>	<b>100%</b>	<b>105.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.000</b>		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	4	36.000	4	40.000	3	35.000	3	35.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	2	50.000	2	65.000	2	60.000	2	60.000		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>252.000</b>	<b>100%</b>	<b>265.000</b>	<b>100%</b>	<b>267.000</b>	<b>100%</b>	<b>269.000</b>	<b>100%</b>	<b>271.000</b>	<b>100%</b>	<b>273.000</b>		

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	18000	12	18.000	12	20.000	12	22.000	12	24.000	12	26.000		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	234.000	12	247.000	12	247.000	12	247.000	12	247.000	12	247.000		
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>181.940</b>	<b>100%</b>	<b>368.639</b>	<b>100%</b>	<b>442.465</b>	<b>100%</b>	<b>482.465</b>	<b>100%</b>	<b>522.465</b>	<b>100%</b>	<b>562.465</b>		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional BPBD Kabupaten Pesawaran	Unit	9	9	181.940	9	328.231	9	377.465	9	392.465	9	407.465	9	422.465		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Unit	-	-	-	10	25.000	10	35.000	10	45.000	10	55.000	10	65.000		
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD Kabupaten Pesawaran	Unit	-	-	-	1	15.408	1	30.000	1	45.000	1	60.000	1	75.000		

## BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD6.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Bupati Pesawaran telah menetapkan arah kebijakan selama lima tahun sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai RPJMD Kabuapten Pesawaran 2021 – 2026. Dan untuk melaksanakan dan mewujudkan misi ke (1) yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi serta misi ke (5) lima yaitu Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika, antara lain:

1. Untuk mewujudkan Misi ke 1 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi), strateginya adalah Peningkatan tata kelola organisasi yang baik dan berbasis teknologi informasi (e-government), dengan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah :
  - a. Mengembangkan data/informasi berbasis teknologi informasi dan penciptaan inovasi daerah, dengan indikator outcome dari arah kebijakan ini adalah :
    - Terfasilitasinya Pemanfaatan Teknologi Informasi
    - Tersedianya Data yang memadai dalam rangka Upaya pengurangan Resiko Bencana
    - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD
    - Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- b. Menyediakan Sarana dan Prasarana kerja aparatur Pemerintah Daerah, dengan indikator outcome dari arah kebijakan ini adalah :
  - Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Untuk mewujudkan Misi ke 5 (Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika) strateginya adalah Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam dalam tanggap darurat bencana alam, dengan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah Meningkatkan peran kelembagaan dalam dalam tanggap darurat bencana alam, dengan indikator outcome nya antara lain :
  - Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari Ancaman Bencana
  - Terwujudnya Penanganan Bencana secara Profesional, Terpadu, Terkoordinasi dan Menyeluruh

## 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian kinerja yang bersifat mandiri.

Dalam hal Bidang penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Pesawaran sesuai dengan renstra 2021 -2026, melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:



1. Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana, dengan indikator sasaran kinerja yang akan dicapai antara lain :
  - Tersusunnya Rencana Kontigensi Dalam Rangka Penanganan Bencana;
  - Terbentuknya Desa Tangguh Bencana;
  - Terwujudnya peningkatan Pengetahuan tentang Penanggulangan bencana di sekolah-sekolah.
  
2. Terwujudnya upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana, dengan indikator sasaran kinerja yang akan dicapai antara lain :
  - Terselenggaranya Sosialisasi dan Pelatihan manajemen Penanggulangan Bencana;
  - Terselenggaranya Apel Siaga Bencana Tingkat Kabupaten;
  - Tersedianya Bapper Stok Logistik untuk Korban Bencana;
  - Terselenggaranya Posko Siaga Bencana dan Operasional TRC;
  - Terselenggaranya Simulasi Peralatan-peralatan Penanggulangan Bencana;
  - Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana;
  - Terselenggaranya Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Bahaya Kebakaran;
  - Terlaksananya Pelatihan Konseling Traumatik Pasca Bencana;
  - Terasilinasinya Upaya Penanganan Pasca Bencana.

Secara jelas indikator kinerja utama yang ditetapkan BPBD Kabupaten Pesawaran yang dapat mendukung indikator kinerja utama daerah sesuai RPJMD Kabuapten Pesawaran 2021 – 2026 terlihat pada tabel 6.1. berikut ini :



					Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Perundangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
					Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
					Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi keluar dan Dalam Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	60
				Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	30	30	50	50	50	50	50	230
				Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit		6	8	8	10	10	12	42
					Tersedianya Peralatan Inventaris Kantor	Unit	3	5	6	8	10	10	10	39
					Tersedianya Meubeler Kantor	Paket	-	-	1	1	5	5	5	12
					Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasionl	Kendar.	11	11	11	11	13	15	15	61
					Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit/Thn	11	11	12	12	12	14	14	61
					Tersedianya Gedungkantor dan Gudang Logistik	Lokasi	2	2	2	-	-	-	-	4
Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteran Masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dari ancaman bencana	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dari ancaman bencana	Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana	Kesiapan Tanggap siaga bencana dan peningkatan kenyamanan lingkungan	Tersusunnya Rencana Kontigensi Dalam Rangka Penanganan Bencana	Dok	-	1	1	1	1	1	1	5
					Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Desa	-	-	2	2	2	2	3	8



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pesawaran berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas teritorial Wilayah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, ataupun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2021–2026. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal di Kabupaten Pesawaran.

Sebagai dokumen resmi, Renstra (rencana Strategis) BPBD Kabupaten Pesawaran merupakan acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Pesawaran khususnya dalam mewujudkan masyarakat Pesawaran yang tangguh menghadapi bencana..

Gedong Tataan, November 2021

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN PESAWARAN,**



**Drs. SOPYAN AGANI, MH.**  
NIP. 19681128 198901 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2021 - 2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>					
1.	Meningktanya desa tangguh bencana	1	Persentase Desa Tangguh Bencana sesuai Kajian Risiko Bencana  $\frac{\text{Jumlah Desa Siaga Bencana}}{\text{target desa siaga bencana}} \times 100\%$	Rekapitulasi Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2.	Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	2	Persentase Penanganan Darurat Bencana  $\frac{\text{Jumlah Penanganan Darurat Bencana}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	Rekapitulasi Jumlah Data Kejadian Bencana yang terjadi	Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Gedong Tataan, November 2021

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN PESAWARAN**



**Drs. SOPYAN AGANI, MH**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19681128 198901 1 001

CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUJUAN RPJMD			SASARAN RPJMD						TUJUAN OPD			SASARAN OPD						KEGIATAN						SUB KEGIATAN						OPD PENANGGULANGAN JAWAB																														
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN (SATUAN)	TARGET 2026	URAIAN	INDIKATOR SASARAN (SATUAN)	TARGET						URAIAN	INDIKATOR TUJUAN (SATUAN)	TARGET 2026	URAIAN	IKU ESELON II OPD	TARGET						URAIAN	INDIKATOR KINERJA ESELON III	TARGET							URAIAN	INDIKATOR KINERJA ESELON IV	TARGET																											
					2021	2022	2023	2024	2025	2026						2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026																						
1	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Mitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	100%	Meningkatnya Kemandirian Desa	% Desa Maju dan Mandiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Desa Tangguh Bencana	% Desa Tangguh Bencana	100%	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	% Desa Tangguh Bencana sesuai Kajian Risiko Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	0	0	0	0	0	0	1	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan																					
					0	0	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan										
					0	1	0	0	1	0						0	1	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
					0	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan						
					0	1	2	2	2	2						2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan								
					0	2	2	2	2	2						2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2				2	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
					0	11	11	11	11	11						11	11	11	11	11	11			11	11	11	11	11	11			11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11				11		BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
					0	-30	-1	30	-1	30						-1	30	-1	30	-1	30			-1	30	-1	30	-1	30			-1	30	-1	30	-1	30	-1		30	-1	30	-1	30	-1	30	-1	30	-1		30				-1			30	-1	BPBD Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
					0	1	2	2	2	2						2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2				BPBD Bidang Kedaruratan dan Logistik					
					0	0	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1							1	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan																								









